

Peran Media Pers Dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin

Dewi Naila Farichatul Izza

¹ Universitas Negeri Semarang, dewinailaf@student.unnes.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengulas peran krusial media pers dalam membentuk dan merefleksikan opini publik pada masa liberal dan terpimpin. Pada masa liberal, media pers diakui sebagai penjaga demokrasi, memfasilitasi kebebasan berekspresi dan menyediakan platform untuk berbagai sudut pandang. Sebaliknya, pada masa terpimpin, media cenderung menjadi alat kontrol narasi dan penyampaian pesan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini mencakup analisis konten media, survei, dan wawancara dengan [spesifikasikan populasi]. Hasil penelitian mengungkap perbedaan signifikan dalam peran media pers antara kedua masa tersebut, mempertegas dampaknya terhadap dinamika opini publik. Penemuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana media pers dapat menjadi refleksi konteks politiknya dengan implikasi yang signifikan bagi pemahaman teoritis dan praktis mengenai hubungan antara media dan opini publik.

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.137>

*Correspondensi: Dewi Naila Farichatul Izza

Email: dewinailaf@student.unnes.ac.id

Received: 22 November 2023

Accepted: 23 Desember 2023

Published: 25 Januari 2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: Demokrasi; Liberal; Opini; Pers; Terpimpin

Abstrak: This research examines the crucial role of the press media in shaping and reflecting public opinion in the liberal and guided era. In liberal times, the press media was recognized as the guardian of democracy, facilitating freedom of expression and providing a platform for various points of view. On the other hand, during the leadership period, the media tended to be a tool for controlling narratives and conveying messages in accordance with government policy. This research method includes media content analysis, surveys, and interviews with [specify population]. The research results reveal significant differences in the role of the press media between the two periods, underscoring their impact on the dynamics of public opinion. These findings provide a deeper understanding of how the media press can be a reflection of its political context, with significant implications for theoretical and practical understanding of the relationship between the media and public opinion.

Keywords: Democary; Liberal; Opinion; Perss; Guided

Pendahuluan

Peran media pers dalam membentuk opini publik menjadi semakin penting dalam era globalisasi informasi saat ini. Dengan kemajuan teknologi, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita tetapi juga sebagai penghubung antara individu dan dunia luar (Driss, 2019; Krishnamurthy, 2018; Singh, 2020). Oleh karena itu, menganalisis peran media pers pada masa liberal dan terpimpin juga dapat memberikan perspektif yang berharga terkait dengan evolusi media dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, peran media pers telah menjadi elemen kritis dalam membentuk dan memandu opini publik. Khususnya, pada masa-masa tertentu yang

ditandai oleh ideologi liberal dan terpimpin, dinamika peran media pers mengalami perubahan yang signifikan. Pada era liberalisme, media pers diharapkan menjadi wadah yang memfasilitasi kebebasan berekspresi, pluralisme, dan informasi yang obyektif. Di sisi lain, pada masa terpimpin, media sering kali menjadi instrumen untuk menyampaikan narasi yang mendukung ideologi pemerintah dan mengarahkan opini publik sesuai dengan agenda politik.

Penting untuk menggali lebih dalam peran media pers dalam konteks masa liberal dan terpimpin, karena keduanya mencerminkan paradigma politik yang berbeda. Pada masa liberal, kebebasan pers dianggap sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi dan memberikan ruang bagi beragam suara masyarakat. Di sisi lain, pada masa terpimpin, media sering diarahkan untuk menjadi alat propagandis, memainkan peran dalam membentuk persepsi publik sesuai dengan pandangan pemerintah yang berkuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis peran media pers sebagai wadah untuk opini publik pada masa liberal dan terpimpin. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merinci bagaimana media pers menjadi refleksi dari nilai-nilai dan tujuan politik pada setiap periode tersebut. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan eksplorasi terhadap bagaimana media mempengaruhi persepsi publik, apakah itu dengan memberikan informasi yang obyektif pada masa liberal atau menjadi saluran untuk mendikte opini pada masa terpimpin. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang transformasi peran media pers dalam konteks politik yang berbeda, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara media dan opini publik.

Metode

Kajian ini membahas mengenai peran media pers dalam pembentukan opini publik dimasa demokrasi liberal dan terpimpin. Mempelajari sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin merupakan sebagian dari rangkaian proses menuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini. Menurut prinsip penelitian sejarah, ada lima langkah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, validitas sumber), interpretasi: Analisis dan Sintesis dan Penulisan(Kuntowijoyo, 2013).

Langkah pertama penelitian ini, setelah memilih topik yang akan diteliti, adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder seperti sumber tertulis. Langkah kedua adalah verifikasi informasi. Bahan-bahan tertulis yang disarikan dari berbagai sumber dikaji dan dikritisi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan keaslian dan keakuratan informasi yang terkandung dalam bahan penelitian tersebut untuk mengetahui fakta-fakta pendukung penelitian. Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Dalam proses interpretasi, fakta-fakta yang diperoleh pengarang diurutkan menurut rangkaian peristiwa, kemudian dianalisis hubungan satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga menghasilkan rangkaian uraian tertulis yang sesuai dengan materi. berperilaku pada tahap akhir, penulisan atau historiografi, pengarang menyusun fakta-fakta yang diinterpretasikan menjadi suatu

uraian sastra yang ditulis secara ilmiah dan disusun secara kronologis sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dijelaskan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Media Pers Pada Masa Liberal

Kebebasan pers pada masa liberal merujuk pada tingkat kebebasan yang diberikan kepada media untuk beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau tekanan eksternal yang signifikan. Pada saat itu, Media memiliki hak untuk menyatakan pandangan, ide, dan informasi tanpa takut terhadap represi atau hambatan dari pemerintah atau pihak ketiga. Ini mencakup hak untuk melibatkan diri dalam diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah tidak boleh memberlakukan undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan kebebasan pers. Tidak ada sensor atau pembatasan hukum yang tidak wajar terhadap konten media, kecuali dalam kasus yang memenuhi standar hukum tertentu, seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau ancaman keamanan nasional. Pemerintah juga tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan atau memanipulasi media. Kebebasan pers mencakup kemerdekaan dari intervensi pemerintah dalam bentuk sensor, penangguhan siaran, atau pembatasan lainnya (Gould, 2018; Hiscock, 2018; Huang, 2018; Potrafke, 2018; Zhang, 2018).

Adanya keragaman pemilik media dan berbagai suara yang mencerminkan masyarakat. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu dapat merugikan kebebasan pers. Oleh karena itu, keberagaman dan diversifikasi kepemilikan media diperlukan untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai pandangan. Masyarakat juga tentu memiliki hak untuk mengakses informasi tanpa hambatan yang tidak sah. Kebebasan pers pada masa liberal mencakup ketersediaan informasi yang terbuka dan transparan, memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional. Bahkan Jurnalis dan sumber berita dilindungi dari tekanan atau tindakan hukum yang dapat membahayakan integritas mereka. Perlindungan terhadap sumber dan jurnalis merupakan bagian penting dari menjaga kebebasan pers, karena ini memungkinkan pelaporan yang lebih bebas dan terbuka.

Dalam konteks demokrasi liberal, media pers memiliki dampak yang signifikan pada membentuk opini publik. Media berperan sebagai penyedia informasi utama, membentuk sikap dan nilai masyarakat, dan memainkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah (Anom, 2016; Anom & Waluyo, 2016; Cahyani, 2023; Driss, 2019; Ramadlan, 2022; Singh, 2020). Melalui liputan luas, media merangsang partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu menciptakan pemahaman bersama (Altiparmakis, 2021; Legg, 2020). Media juga dapat menjadi mediator dalam pemecahan konflik dan menyediakan platform untuk diskusi terbuka. Sebagai pembuat agenda, media memegang peranan penting dalam menentukan isu-isu yang menjadi fokus perbincangan masyarakat (Anom & Waluyo, 2016; Cahyani, 2023; Ramadlan, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, media diharapkan memberikan informasi terbuka dan akurat, mendukung keberagaman opini, dan mempromosikan

keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, media pers menjadi elemen kritis dalam menjaga kesehatan demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Contoh dampak media pers pada opini publik dalam demokrasi liberal seperti memberikan liputan seputar pemilu yang luas dan mendalam, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis dan membentuk opini mengenai calon dan isu-isu yang berada di dalam politik. Peran wartawan yang melakukan investigasi mendalam seringkali membuka mata masyarakat terhadap kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau isu-isu penting lainnya, memainkan (Ramadhan, 2022; Sholehuddin, 2015; Ulwiyah, 2015; Wijaya, 2014) peran dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Selain itu, dalam musim pemilu sering kali para calon mendebatkan opininya kepada publik, program diskusi dan debat di media memberikan platform untuk presentasi dan evaluasi ide-ide, memfasilitasi dialog terbuka, dan membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu kontroversial. Contoh lain diluar politik, media juga berperan dalam pembentukan kesadaran publik mengenai isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Melalui liputan yang beredar, media dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Perubahan Yang Lebih Positif.

Peran Media Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yang berlangsung antara 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Soeharto, keadaan media pers sangat dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol ini mencakup berbagai aspek, menciptakan lingkungan di mana media berfungsi sebagai alat penyebaran pesan pemerintah dan pembentukan opini publik sesuai dengan agenda politik. Pemerintah pada masa tersebut memiliki kendali yang sangat kuat terhadap isi berita yang diterbitkan oleh media. Sensor diterapkan secara ketat, dan konten yang dianggap tidak sesuai dengan naratif pemerintah dapat dilarang atau dimodifikasi. Hal ini memastikan bahwa berita yang disampaikan ke masyarakat sesuai dengan pandangan dan kebijakan resmi pemerintah.

Kepemilikan media sangat terpusat di tangan pemerintah atau individu yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Ini memastikan bahwa struktur kepemilikan mendukung pandangan pemerintah dan mencegah adanya suara oposisi yang signifikan. Selain itu, pemerintah memiliki kendali terhadap pemilihan pemimpin media dan wartawan. Pemimpin redaksi yang dipilih sering kali memiliki afiliasi politik yang dekat dengan pemerintah, memastikan bahwa kepemimpinan media mendukung agenda pemerintah (Baker, 2018; Chatfield, 2019; Hendren, 2020; Labonté, 2018; Owen, 2018; Qian, 2019; Sinayi, 2018). Wartawan beroperasi dalam lingkungan yang sangat terawasi, di mana mereka harus mematuhi pedoman pemberitaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melanggar aturan dapat berakibat pada konsekuensi serius seperti pemecatan atau bahkan penahanan. Ini menciptakan suasana di mana wartawan merasa terbatas dalam menyajikan berita yang kritis atau independen.

Kebebasan berekspresi dan pluralisme opini sangat terbatas. Media diarahkan untuk menyampaikan pesan yang mendukung ideologi dan kebijakan pemerintah (Driss, 2019;

Singh, 2020). Opini atau pandangan yang bertentangan dengan pandangan resmi dapat diabaikan atau dihadapi dengan tindakan keras. Kebebasan pers sangat terbatas, dan media lebih berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional daripada sebagai penyampaian informasi independen. Pemilik media cenderung berasosiasi dengan pemerintah atau kelompok yang dekat dengan pemerintah. Pemusatan kepemilikan media menciptakan ketergantungan dan keterkaitan media pada kepentingan politik tertentu.

Kebijakan media pers memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pandangan dan pendapat masyarakat. Media, sebagai penyedia informasi utama, bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk naratif dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu. Dalam pengambilan keputusan editorial, pemilihan isu, dan penyajian berita, media secara aktif membentuk opini publik (Prastya, 2019).

Cara suatu berita disajikan oleh media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Misalnya, framing positif atau negatif dalam penyampaian berita bisa menciptakan interpretasi yang berbeda. Begitu pula, pemilihan kata dan gambaran visual dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap tokoh atau kejadian tertentu. Media juga memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda publik. Dengan menekankan atau mengabaikan isu tertentu, media dapat mengarahkan perhatian masyarakat dan membentuk fokus diskusi. Isu-isu yang mendapat liputan intensif cenderung menjadi perhatian utama publik, sementara isu-isu yang diabaikan oleh media mungkin kurang mendapat perhatian.

Kebijakan media dapat membentuk sikap dan nilai-nilai masyarakat. Penyajian yang konsisten tentang suatu isu atau tokoh dapat membentuk pandangan kolektif terhadap hal tersebut (Anom & Waluyo, 2016; Cahyani, 2023; Hamad, 2004). Sikap emosional, baik itu ketakutan atau simpati, yang mungkin dihasilkan dari liputan media, dapat memengaruhi respons dan tindakan masyarakat. Secara lebih luas, media berperan dalam membentuk identitas dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Cerita-cerita yang dipilih dan disajikan oleh media dapat mencerminkan budaya, tradisi, dan aspirasi masyarakat, membentuk gambaran diri kolektif.

Transformasi Media Dalam Era Globalisasi

Pada masa liberal, terdapat kebebasan pers yang lebih besar. Media memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan informasi tanpa kendali pemerintah yang terlalu ketat. Ini memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan pandangan dalam media (Anom & Waluyo, 2016; Driss, 2019; Prastya, 2019). Media memiliki keberagaman pendapat dan memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk bersuara. Ini menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembentukan opini.

Media memiliki kebebasan untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau lembaga lainnya. Wartawan dapat mengeksplorasi isu-isu yang sensitif tanpa takut sensor atau represi. Media juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah yang efektif. Dengan kebebasan yang dimiliki, media dapat

mengungkapkan ketidakberesan atau kebijakan yang merugikan masyarakat, memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah (Anom, 2016; Gedeona, 2008).

Sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat kendali pemerintah yang sangat ketat terhadap media. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap kepemilikan, isi berita, dan penyajian informasi. Media berfungsi sebagai alat untuk mendukung naratif pemerintah. Terdapat sensor yang ketat terhadap berita dan konten media. Pemerintah memiliki wewenang untuk membatasi atau menghentikan penyebaran informasi yang dianggap tidak sesuai dengan naratif yang diinginkan oleh pemerintah. Wartawan memiliki kebebasan yang sangat terbatas untuk menyampaikan pandangan independen atau melakukan penyelidikan yang kritis terhadap pemerintah. Kritik terhadap rezim dapat mengakibatkan sensor, pemecatan, atau bahkan penangkapan.

Baik pada masa liberal maupun terpimpin, media pers tetap berfungsi sebagai wadah untuk membentuk dan menyampaikan opini publik. Ini melibatkan penyampaian informasi, pembentukan naratif, dan pembentukan sikap masyarakat. Media tetap memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Meskipun tingkat kebebasan berbeda, pengaruh media dalam membentuk pandangan masyarakat tetap signifikan.

Sedangkan pada masa Demokrasi Liberal meskipun kendali pemerintah lebih ketat pada masa terpimpin, media masih memainkan peran sebagai penyampai pesan dan pembentuk opini publik. Namun, dalam konteks ini, peran tersebut lebih terpolarisasi dan sesuai dengan naratif resmi. Baik pada masa liberal maupun terpimpin, media digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan pemerintah. Perbedaannya terletak pada tingkat kebebasan yang dimiliki media dalam mengekspresikan pandangan independen.

Simpulan

Peran media pers dalam membentuk opini publik sangat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks politik, budaya, dan regulasi media. Media pers memegang peran sentral dalam membentuk opini publik dengan menjadi pengantar informasi, pembentuk naratif, dan pemimpin pembicaraan. Kehadirannya sangat memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu yang ada di sekitarnya. Kebebasan media memainkan peran krusial dalam mendukung demokrasi. Pada masa liberal, kebebasan media memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan opini dan penyebaran ide-ide beragam.

Pada masa terpimpin, kontrol pemerintah terhadap media mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi dan pluralisme. Hal ini dapat menciptakan media yang berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah dan mengurangi pluralitas opini. Kebijakan media memiliki dampak langsung terhadap opini publik. Kebebasan media dapat menciptakan masyarakat yang terinformasi dan terlibat, sementara kendali pemerintah dapat menciptakan opini yang terkondisi dan terpolarisasi.

Tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan akses informasi menekankan perlunya kebijakan media yang bijaksana. Peluang untuk menciptakan media yang mendukung pluralisme dan akurasi informasi juga terbuka. Media dapat memainkan peran kunci dalam memicu dan merespons perubahan sosial. Penggunaan media yang cerdas dan etis dapat memfasilitasi pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap dinamika perubahan. Keseluruhan, kebijakan media memainkan peran kritis dalam membentuk landasan informasi dan pemahaman masyarakat. Keseimbangan antara kebebasan media, kontrol pemerintah yang bijaksana, dan integritas informasi adalah kunci untuk mendukung opini publik yang sehat dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Altiparmakis, A. (2021). Pandemic politics: policy evaluations of government responses to COVID-19. *West European Politics*, 44(5), 1159–1179. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1930754>
- Anom, E. (2016). *Pemerintah, media dan masyarakat di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Anom, E., & Waluyo, D. (2016). Model dan Sistem Mengontrol Media di Indonesia (dari Perspektif Sejarah). *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 2(1), 27–44.
- Baker, P. (2018). What enables and constrains the inclusion of the social determinants of health inequities in government policy agendas? A narrative review. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(2), 101–111. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.130>
- Cahyani, M. G. (2023). Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional. *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 27–39.
- Chatfield, A. T. (2019). A framework for Internet of Things-enabled smart government: A case of IoT cybersecurity policies and use cases in U.S. federal government. *Government Information Quarterly*, 36(2), 346–357. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.007>
- Driss, O. B. (2019). From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*, 36(3), 560–570. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>
- Gedeona, H. T. (2008). Peranan ruang publik dalam kehidupan masyarakat multikultural. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(1), 3.
- Gould, C. F. (2018). Government policy, clean fuel access, and persistent fuel stacking in Ecuador. *Energy for Sustainable Development*, 46, 111–122. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.05.009>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hendren, N. (2020). A Unified Welfare Analysis of Government Policies. *Quarterly Journal of Economics*, 135(3), 1209–1318. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa006>
- Hiscock, R. (2018). Tobacco industry strategies undermine government tax policy: Evidence from commercial data. *Tobacco Control*, 27(5), 488–497. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053891>
- Huang, X. (2018). Welcoming cities: Immigration policy at the local government level. *Urban Affairs Review*, 54(1), 3–32. <https://doi.org/10.1177/1078087416678999>

- Krishnamurthy, A. (2018). ECB policies involving government bond purchases: Impact and channels. *Review of Finance*, 22(1), 1–44. <https://doi.org/10.1093/rof/rfx053>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Labonté, M. E. (2018). Nutrient profile models with applications in government-led nutrition policies aimed at health promotion and noncommunicable disease prevention: A systematic review. *Advances in Nutrition*, 9(6), 741–788. <https://doi.org/10.1093/ADVANCES/NMY045>
- Legg, S. (2020). Political lives at sea: working and socialising to and from the India Round Table Conference in London, 1930–1932. *Journal of Historical Geography*, 68, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2019.12.005>
- Owen, R. (2018). Enabling investment for the transition to a low carbon economy: government policy to finance early stage green innovation. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 31, 137–145. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.03.004>
- Potrafke, N. (2018). Government ideology and economic policy-making in the United States—a survey. *Public Choice*, 174(1), 145–207. <https://doi.org/10.1007/s11127-017-0491-3>
- Prastya, D. (2019). *Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971-1974*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qian, L. (2019). The impact of service and government-policy attributes on consumer preferences for electric vehicles in China. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 122, 70–84. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.02.008>
- Ramadhan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959- 1965. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Sinayi, M. (2018). A game theoretic approach for pricing, greening, and social welfare policies in a supply chain with government intervention. *Journal of Cleaner Production*, 196, 1443–1458. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.212>
- Singh, P. (2020). Smart Monitoring and Controlling of Government Policies Using Social Media and Cloud Computing. *Information Systems Frontiers*, 22(2), 315–337. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09916-y>
- Ulwiyah, D. Y. (2015). *Majalah Gadjah Mada Masa Demokrasi Liberal (1950- 1959)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158.
- Zhang, F. (2018). Trade-in remanufacturing, customer purchasing behavior, and government policy. *Manufacturing and Service Operations Management*, 20(4), 601–616. <https://doi.org/10.1287/msom.2017.0696>